



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DAMSYI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **14054**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 926.250.000**

1. Tanah Seluas 2280 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 146.000.000
2. Tanah Seluas 9270 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 115.875.000
3. Tanah Seluas 17150 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 214.375.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/120 m2 di LAMPUNG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 616.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2008,
HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1998, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
5. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
7. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI



Rp. 13.000.000

8. MOBIL, FORTUNER G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	68.200.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	148.911.686
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.759.361.686
III. HUTANG	Rp.	432.975.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.326.386.686

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.